

DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat COVID-19 Hingga 30 September 2020

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 mulai 1 September hingga 30 September 2020.

Perpanjangan status tersebut diputuskan melalui SK Gubernur Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 DIY.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadamanta Baskara Aji di Kompleks Pagelaran Kraton Yogyakarta, Senin (31/8), menjelaskan alasan perpanjangan status itu di antaranya karena hingga kini masih ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DIY. "Pertimbangan paling utama karena kasus konfirmasi (COVID-19) masih ada," kata Aji.

Ia mengatakan dengan kembali ditetapkan status tanggap darurat, berbagai tindakan yang bersifat darurat dan cepat diharapkan akan lebih mudah dilakukan.



ANTARA/Luqman Hakim
Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji

"Tindakan yang sifatnya darurat, cepat akan lebih mudah kalau kondisinya masih tanggap darurat," kata dia.

Menurut Aji, saat ini Pemda DIY juga akan mengkaji kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi dan kabupa-

ten/kota. "Beliau (Gubernur DIY) sudah dhawuk kepada saya untuk mengkaji kapan (pembelajaran tatap muka) di sekolah dimulai. Nanti saya akan bertemu Gugus Tugas Bidang Pendidikan DIY dan kabupaten/kota," kata dia.

Meski demikian, ia memastikan, uji coba perkuliahan tatap muka di perguruan tinggi akan lebih dahulu dimulai sekitar pertengahan September 2020. "Perguruan tinggi cenderung jauh lebih siap dibandingkan pendidikan menengah. Pertama karena peserta didiknya sudah dewasa, kedua sarana prasarannya lebih lengkap dibandingkan di sekolah," kata dia. (ANTARA)

Wapres Berpesan Pandemi Jangan Diperkeruh Polemik Kehalalan Vaksin

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'rif Amin berpesan supaya persoalan pandemi jangan sampai diperkeruh dengan polemik terkait kehalalan vaksin, yang saat ini masih dalam proses uji klinis, kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).

"Hal itu bisa menimbulkan gejala di masyarakat yang concern pada status halal vaksin. Pesan Wapres, jangan sampai problem pandemi ini diperkeruh oleh polemik kehalalan vaksin," kata Masduki.

Untuk memastikan agar vaksin COVID-19 dapat dengan aman diberikan kepada masyarakat, lanjut Masduki, Wapres meminta berbagai lembaga sertifikasi halal untuk proaktif dalam melakukan sertifikasi kehalalannya. "Wapres menekankan proses pemeriksaan pemenuhan standar halal vaksin harus berjalan seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi, sehingga tidak mengganggu jadwal

vaknasasi," tambahnya. Selain memastikan proses halal tidak menghambat uji klinis, produksi, dan distribusi vaksin, Wapres juga memastikan vaksin yang beredar jangan sampai belum bersertifikat halal, tukasnya.

Sebelumnya, pada rapat bersama PT Bio Farma di Jakarta, Kamis (27/8), Ma'rif Amin meminta proses sertifikasi halal terhadap vaksin COVID-19 harus berjalan cepat.

"Untuk halal itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau memang produk itu sangat dibutuhkan, maka ada jalan keluarnya untuk memperoleh sertifikat halal itu. Kuncinya vaksin dan



ANTARA/Asdep KIP Setwapres
Wapres Ma'rif Amin

vaknasasi itu harus di-backup oleh sertifikat halal," kata Ma'rif Amin.

Ma'rif meminta kepada lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal untuk berkoordinasi dan bergerak cepat bersamaan dengan proses produksi dan uji klinis terhadap vaksin COVID-19. Lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan

dan Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa MUI.

PT Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, untuk memproduksi vaksin COVID-19, yang saat ini sedang dilakukan uji klinis tahap ketiga. Setelah uji klinis tahap ketiga lolos, maka vaksin COVID-19 akan siap diproduksi massal dengan melalui izin edar dan sertifikasi halal. (ANTARA)

Gubernur Jateng Fokus Beri Stimulus Usaha Mikro dan Kecil

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku fokus memberikan stimulus para pelaku usaha mikro dan kecil guna meningkatkan perekonomian sekaligus sebagai persiapan menghadapi ancaman resesi saat pandemi COVID-19.

"Proses ekonomi sekarang ini memang sedang goncang dan kita perlu menyiapkan langkah untuk bisa bertahan. Peran pemangku kepentingan, khususnya usaha kecil mikro, saat ini menjadi penting untuk membangkitkan ekonomi. Kita siapkan agar bisa bangkit, maka pemerintah sebagai stimulator dan dinamisator dalam beberapa hal bisa menjadi 'offtaker' karena regulasi memungkinkan," katanya di Semarang, Senin (31/8).

Ganjar menjelaskan bahwa di Jawa Tengah sudah dilakukan pemetaan terkait sektor-sektor yang perlu mendapat dorongan dan pertolongan saat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Ganjar juga melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan untuk menghitung bersama sektor tersebut dan berdasarkan urutan, sektor tertinggi adalah pariwisata, transportasi, dan perhotelan.

"Ini urutannya, nanti sampai kepada

bisnis terkait memang perlu mendapatkan 'rescue', mudah-mudahan nanti kita bisa melalui kesulitan ekonomi ini dengan baik. APBD dan APBN yang kita miliki dikerahkan untuk mendorong ke sana. Sekarang kita harus lebih hati-hati, lebih strategis lagi untuk memilih sektor yang kita bantu," ujarnya.

Di tengah kondisi seperti ini, lanjut Ganjar, memetakan kebutuhan dalam negeri menjadi sangat penting sehingga mendorong produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, bantuan sosial juga banyak dibutuhkan dalam menghadapi situasi seperti ini sehingga Ganjar tak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk membeli produk kawan sendiri dan produk dalam negeri.

"Kita dorong ke sana, kalau sudah tahu kebutuhan dalam negeri bapa saja, yuk kita buat, kota produksi sendiri, kemudian kita jual dan kita penuhi kebutuhan dalam negeri sendiri," katanya.

Langkah lain yang disiapkan adalah dorongan untuk menciptakan dan menumbuhkan wirausahawan baru yang bisa untuk mengantisipasi kebutuhan pekerjaan dengan menciptakan pekerjaan. (ANTARA)

Yogyakarta Lakukan Pendataan Siswa untuk Akses Bantuan Pulsa

YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulai meminta seluruh sekolah di kota tersebut melakukan pendataan terhadap nomor telepon yang digunakan siswa sebagai syarat mengakses bantuan pulsa dari pemerintah, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19.

"Sudah ada surat dari pusat dan itu yang kami teruskan ke sekolah. Sekolah yang akan mendata nomor telepon seluler yang digunakan siswa untuk mengakses bantuan pulsa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Ashrori di Yogyakarta, Senin (31/8).

Dia mengatakan seluruh data terkait nomor telepon yang digunakan siswa seharusnya sudah bisa dikumpulkan pada 31 Agustus, namun kemudian tenggat waktu pendataan diperpanjang hingga maksimal 11 September.

Meskipun demikian, Budi mengatakan, tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pemberian bantuan pulsa dan nilai bantuan yang akan diterima oleh siswa. "Yang pasti, bantuan ini berlaku untuk se-



ANTARA/Eka AR
Sejumlah guru di SMP Negeri 9 Yogyakarta melakukan pembelajaran secara daring.

mua siswa, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta," katanya.

Di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 24.000 siswa SMP dan sekitar 42.000 siswa SD. "Data dari sekolah langsung dikirim ke pusat. Mudah-mudahan bisa direalisasikan," katanya.

Kepala SMP Negeri 15 Kota Yogyakarta Siti Arina Budiastuti mengatakan sudah mengirimkan data nomor telepon yang digunakan oleh siswa ke pusat. "Sebelumnya, kami sudah memiliki data nomor telepon siswa. Jadi, ketika ada pemberitahuan tersebut, cukup melakukan konfirmasi ke

siswa dan apabila ada perubahan nomor telepon bisa langsung dilakukan perbaikan data," katanya.

Di SMP Negeri 15 Yogyakarta terdapat 996 siswa. Namun demikian, tidak semua siswa memiliki nomor telepon pribadi tetapi menggunakan telepon milik orang tua atau menggunakan telepon bersama saudaranya. "Ada dua siswa, kebutuhan kembang, yang harus datang ke sekolah karena tidak memiliki telepon seluler. Mereka tetap mengikuti pembelajaran daring dari ruang komputer di sekolah," katanya.

Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala

dalam proses pembelajaran daring seperti anak kesulitan membeli paket data internet meski di rumahnya ada telepon seluler. "Di sekolah kami, para guru mengumpulkan infak yang kemudian diberikan dalam bentuk paket data ke siswa yang membutuhkan. Setiap pekan sekali, guru pun melakukan pendampingan langsung ke anak yang benar-benar membutuhkan bantuan," katanya.

Ia berharap, bantuan pulsa ke siswa tersebut akan meringankan beban orang tua sehingga siswa bisa mengikuti berbagai pembelajaran daring dengan lebih baik. (ANTARA)

Kemenkes Komitmen Tingkatkan Cakupan Imunisasi Rutin di Masa Pandemi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar rutin bagi anak-anak Indonesia di masa pandemi COVID-19, dalam rangka menjamin hak sehat anak guna menghasilkan sumber daya manusia unggul di masa depan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan di Jakarta, Senin (31/8), bahwa Kementerian Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah akan menyiapkan segala kebutuhan imunisasi mulai dari logistik hingga fasilitas kesehatan untuk dapat memenuhi cakupan program imunisasi dasar rutin.

Menurut Yurianto, pasokan dan distribusi vaksin untuk keperluan program imunisasi dasar memang sempat terkendala pada



ANTARAFOTO/Aprilio Akbar/rip
Dokter dari Puskesmas Tebet menyuntikkan vaksin Measles Rubella (MR) kepada pelajar SDN Tebet Timur 15 Pagi di Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, dalam rangkaian Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2020.

masa awal pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Distribusi vaksin menjadi terhambat karena banyak maskapai penerbangan menunda jadwal keberangkatan atau bahkan ditutup.

Namun Yurianto menegaskan pasokan dan rantai distribusi vaksin untuk pro-

gram imunisasi dasar disertai dengan alat pelindung diri sudah terjamin pada saat ini.

"Periode itu bukan hanya kesulitan kita menjaga stok, tapi distribusi dari pusat ke daerah juga jadi masalah karena banyak penerbangan ditunda. Sekarang alhamdulillah semua sudah lancar, distribusi pusat ke daerah

aman, pengadaan vaksin pun sudah masuk. Kelangkaan yang terjadi kemarin hanya pada masalah distribusi, dan ini sudah kita selesaikan," jelas Yurianto. Dia juga menerangkan bahwa pemerintah telah memiliki data anak sesuai usia masing-masing yang harus dilakukan imunisasi. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang biasanya dilakukan di sekolah pun tetap harus dilakukan dengan mendorong para orang tua agar melakukan imunisasi anaknya di fasilitas kesehatan. Pemerintah, kata Yurianto, sedang menyiapkan berbagai hal untuk berinovasi dalam memberikan layanan imunisasi bagi anak agar proses pemberian vaksin tetap aman dan nyaman dilakukan seperti di fasilitas kesehatan Puskesmas ataupun Posyandu. (ANTARA)

ANTARANEWS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memberikan bantuan paket internet guna menunjang pendidikan jarak jauh (PJJ) bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen pada September hingga Desember 2020. Lembaga pendidikan akan memverifikasi data siswa yang mendapatkannya.

INTERNET GRATIS
TUNJANG PENDIDIKAN JARAK JAUH

TOTAL ANGGARAN
Rp7,2 triliun

DURASI
September-Desember 2020

JUMLAH SISWA PJJ
68.729.037

KUOTA

Siswa 35 GB/bulan

Guru 42 GB/bulan

Mahasiswa/dosen 50 GB/bulan

CARA DAFTAR PAKET INTERNET SISWA

- Wali kelas mengunduh aplikasi Dapodik di laman <https://kemdikbud.go.id>.
- Pendaftaran nomor ponsel siswa dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ke aplikasi Dapodik hingga 11 September 2020
- Kepala sekolah menandatangani pakta integritas validasi data, lalu diunggah ke Dapodik.
- Paket internet diberikan langsung ke nomor telepon siswa terdaftar.
- Siswa yang belum memiliki ponsel atau nomor seluler bisa ikut pendaftaran paket internet gratis periode berikutnya.

Zona merah

1.840

Zona oranye

12.124

Zona kuning

6.238

Zona hijau

764

JUMLAH SEKOLAH BERLAKUKAN PJJ

☞ Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp9 triliun tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3 sampai 4 bulan ke depan. ☞

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DATA: KEMENDIKBUD FOTO: ANTARA RISET MOENG GRAFIS ERIE EDITOR: BAYU